

Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama : Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru

Amelia¹ Eko Handrian²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
amelia24@student.uir.ac.id ekohandrian@soc.uir.ac.id

Received : July 29, 2024;

Accepted : 30 Juli 2024

Abstract

One of the government's ways of dealing with poverty is by implementing the Sustainable Development Goals/SDGs program. The purpose of evaluation is the Sustainable Development Goals is to provide an overview of target achievement and analyze problems and causal factors. This research was conducted at the Regional Research and Development Planning Agency of Riau Province. The aim of this research aims to determine and explain the evaluation of the implementation of sustainable development goals by the Riau Province Research and Development Regional Development Planning Agency (Poverty First Goal Study) in Pekanbaru City. The theoretical concept used in this research is Nurcholis (2007:277). The method used in this research is a qualitative method using a descriptive approach. Data was collected using observation, interview, and documentation techniques with the triangulation analysis method. The factors that hinder the evaluation of the implementation of development goals (study of the first objective of poverty) in Pekanbaru City are lack of time discipline, human resources, unavailability of adequate reports, coordination and cooperation between agencies.

Key Words : *Evaluation, Implementation, Sustainable Development Goals(SDGs)*

Abstrak

Salah satu cara pemerintah dalam menangani kemiskinan adalah dengan dilaksanakannya program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs. Tujuan dari evaluasi dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah memberikan gambaran atas pencapaian target dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya. Penelitian ini dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan evaluasi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama : Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. Konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Nurcholis (2007:277). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan metode analisis triangulasi. Adapun faktor-faktor yang menghambat evaluasi pelaksanaan tujuan pembangunan (studi tujuan pertama : kemiskinan) di Kota Pekanbaru yaitu kurangnya kedisiplinan waktu, sumber daya manusia, ketidakterersediaan laporan yang memadai, koordinasi dan kerjasama antar instansi.

Kata Kunci : *Evaluasi, Pelaksanaan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(SDGs)*

Pendahuluan

Secara etimologis, administrasi berasal dari dari bahasa latin dan ministrare, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta administration yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan”. Di Italia disebut *administrazion*, sedangkan di Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat disebut *administration*. Pengertian tersebut kemudian berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman.

Maju mundurnya suatu bangsa tergantung pada baik buruknya administrasi. Tidak ada satu hal untuk abad modern sekarang ini yang lebih penting dari administrasi. Kelangsungan hidup pemerintahan yang beradab dan bahkan kelangsungan hidup peradaban itu sendiri akan sangat tergantung dengan kemampuan kita untuk membina dan mengembangkan suatu filsafat administrasi yang mampu memecahkan masalah-masalah masyarakat modern.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki penduduk terbanyak ke-4 di Dunia. Negara Indonesia yang merupakan Negara berkembang berusaha menurunkan kemiskinan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu.

Kota Pekanbaru yang merupakan Ibukota dari Provinsi Riau merupakan salah satu kota yang mengalami perkembangan sangat pesat dalam pembangunan di berbagai bidang, sehingga kota Pekanbaru harus siap dalam menghadapi segala bentuk resiko maupun kendala yang akan muncul, salah satunya mengenai kemiskinan yang ada di perkotaan.

Kemiskinan merupakan masalah klasik yang hampir bisa dikatakan akan tetap menjadi sebuah kenyataan abadi di dalam kehidupan manusia. Pengertian kemiskinan sendiri adalah suatu konsep ilmiah yang lahir sebagai dampak dari pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau manusiawi tidak bisa dipisahkan dari target-target yang tidak tercapai yang berimplikasi pada kemiskinan.

Tinjauan Pustaka

Konsep Administrasi

Administrasi dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial bahwa dia tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus melakukan kerjasama dengan orang lain yang mempunyai ide dan tujuan yang sama, dengan melakukan administrasi maka tujuan tersebut akan tercapai.

Definisi administrasi yang secara implisit menggambarkan keseluruhan dimensi itu dirumuskan oleh The Liang Gie dalam (Zulkifli, 2009:13) administrasi merupakan segenap rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

Menurut Wirman Syafri (2012:3) administrasi berasal dari bahasa Latin *ad* dan *ministrar*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administration* yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan”.

Menurut Sondang P Siagian (Beddy Irawan (2017:28) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Beddy Irawan (2017:25) mengatakan di Indonesia administrasi merupakan kegiatan dengan bantuan berbagai sumber daya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelum sering didefinisikan dalam artian sempit. Oleh karena itu dijelaskan juga administrasi dalam arti "sempit" maupun "luas" sebagai berikut :

1. Administrasi dalam arti sempit

Administrasi khususnya di Indonesia sering dimaknai dengan kegiatan "tulis menulis" "catat mencatat" "mengetik" "surat menyurat", yaitu suatu proses kegiatan yang berkaitan dengan pengiriman informasi secara tertulis dimulai dari penyusunan, penulisan hingga pengiriman informasi dan sampai kepada pihak yang telah dituju.

2. Administrasi dalam arti luas

Sebagai proses kerjasama saat penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

Administrasi publik adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara.

Secara sederhana, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Kajian ini termasuk mengenai birokrasi penyusunan, pengimplementasian, dan pengevaluasian kebijakan publik administrasi pembangunan pemerintahan daerah good governance, bahkan perkembangan saat ini telah melingkupi kepublikan (publicness) atau yang biasa dikenal dengan nilai publik (public value).

Menurut John M.Pfiffer dan Robert V administrasi publik adalah suatu yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan Negara yang telah ditetapkan oleh Badan Perwakilan Politik.

Menurut Leonard D White administrasi publik adalah semua kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan dengan mendasarkan kepada kebijakan Negara.

Chandler & Plano (dalam Pasolong 2016:7) mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Dimoock & Dimock (dalam Pasolong 2016:20) juga mengatakan bahwa administrasi publik merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga, mulai dari suatu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa, disusun kemudian dikendalikan.

Menurut Dwight Waldo (dalam Syafii 2010:25) administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Sedangkan menurut George J. Gordon (dalam Syafii 2010:25) administrasi publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Konsep Evaluasi

Definisi evaluasi yang dikemukakan oleh Budi Winarno dalam bukunya yang berjudul "Teori dan Proses Kebijakan Publik" yaitu :

Evaluasi dapat dilakukan karena kebijakan publik gagal meraih maksud dan tujuan untuk melihat sebab-sebab kegagalan. Suatu evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih sempit, evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai "manfaat suatu kebijakan" (Winarno, 2002:165).

Menurut Spuiling (2008:29) evaluasi sebagai kegiatan yang dilakukan untuk tujuan pengambilan keputusan yang kemudian menghasilkan rekomendasi guna perbaikan program.

Dengan demikian evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan atau program. Boyle (dalam Suharto, 2006:120) mengatakan bahwa evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program. Dengan demikian evaluasi kebijakan bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan
2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran.

Menurut Nurcholis (2007:277) evaluasi adalah proses yang mendasarkan dari prinsip ketat dan tahapan waktu. Oleh karena itu, kita harus membuat skema umum penilaian dan membuat seperangkat instrument yang meliputi :

1. Input yaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan.
2. Proses yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat
3. Outputs (hasil) yaitu dari pelaksanaan kebijakan.
4. Outcomes (dampak) yaitu apakah suatu kebijakan berdampak nyata terhadap sekelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan.

Dapat disimpulkan bahwa mengevaluasi pada dasarnya merupakan sebuah seni tersendiri. Didalam proses pelaksanaan evaluasi terlebih dahulu harus menentukan apa yang harus di ukur, menetapkan standar kinerja, melakukan pengukuran dan bila tidak sesuai dengan harapan, maka melakukan tindakan koreksi.

Menurut Vendung (dalam Wirawan, 2011:16) evaluasi melihat kebelakang agar dapat menyetir kedepan. Evaluasi merupakan mekanisme untuk memonitor, mensistemasan, dan meningkatkan aktivitas pemerintah dan hasil-hasilnya sehingga pejabat publik dalam

pekerjaannya dimasa akan datang dapat bertindak serta bertanggung jawab, kreatif, dan seefisien mungkin. Intervensi Negara modern sedemikian ekstensif, eksekusinya rumit, dan potensi konsekuensinya sedemikian jauh sehingga ilmu pengetahuan dan penelitian sosial perlu untuk memonitor operasi dan pengaruh yang dihasilkan.

Menurut Wirawan (2011:71) masukan (input) melukiskan sumber-sumber yang diperlukan oleh program. Sumber-sumber meliputi antara lain tenaga, keuangan, dan sumber-sumber masyarakat yang dapat dimanfaatkan program untuk merancang dan melaksanakan program. Intervensi ini dipakai untuk menimbulkan perubahan. Keluaran (output) program merupakan produk langsung dari pelaksanaan program-program yang disebut juga sebagai intervensi atau perlakuan program. Intervensi ini dipakai untuk menimbulkan perubahan. Keluaran (output) program merupakan produk langsung dari aktivitas program yang dapat berupa target jenis dan level layanan yang harus disajikan oleh program. Pengaruh (outcomes) adalah perubahan khusus perilaku, pengetahuan, keterampilan, status, dan level berfungsinya para partisipan program yang mendapatkan layanan atau intervensi.

Menurut Wirawan (2011:21) evaluasi proses dimulai ketika program mulai dilaksanakan. Faktor-faktor yang dinilai antara lain layanan dari program: program pelaksanaan layanan, pemangku (stakeholder) yang dilayani, sumber-sumber yang dipergunakan, pelaksanaan program dibandingkan dengan yang diharapkan dalam rencana dan kinerja pelaksanaan.

Evaluasi proses adalah evaluasi formatif yang berfungsi mengukur kinerja program untuk mengontrol pelaksanaan program. Salah satu cakupannya adalah mengukur apakah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program jika terjadi penyimpangan dari yang direncanakan, diputuskan apa yang harus dilakukan untuk mengontrol ketimpangan dan mengembalikan pelaksanaan program ke treknya dalam pengertian: kinerja yang diharapkan, pengguna man, money, material, machine, dan method yang dipergunakan untuk melaksanakan program.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi digunakan untuk mengukur suatu program apakah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program atau tidak.

Menurut Wirawan (2011:22-24) tujuan dari evaluasi antara lain :

1. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat.
2. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
3. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana.
4. Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi program yang jalan, mana yang tidak jalan.
5. Pengembangan staf program.
6. Memenuhi ketentuan undang-undang.
7. Akreditasi program.
8. Mengukur cost effectiveness dan cost-efficiency.

9. Mengambil keputusan mengenai program.
10. Accountabilitas.
11. Memberikan balikan kepada pimpinan dan staf program.
12. Memperkuat posisi politik.
13. Mengembangkan teori ilmu evaluasi dan riset evaluasi.

Menurut Dunn (dalam Agustino) Evaluasi adalah berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat hasil kebijakan. Salah satu fungsi evaluasi kebijakan penelitian dan keberhasilan yang dapat memberikan informasi yang valid berkaitan dengan kinerja kebijakan.

Konsep Evaluasi Kebijakan

Bila mengacu pada teori Jones (1984:198) evaluasi kebijakan adalah "Judging the merit government processes and program" bahwa evaluasi kebijakan adalah penilaian terhadap kemampuan pemerintah dalam proses dan programnya. (Dalam Badrudin, 2015:261).

Evaluasi kebijakan secara sederhana menurut William Dunn (dalam Leo Agustino, 2014:187) berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat hasil kebijakan. Salah satu fungsi evaluasi kebijakan penilaian dan keberhasilan yang dapat memberikan informasi yang valid berkaitan dengan kinerja kebijakan.

Evaluasi kebijakan publik menurut Lester dan Stewart (2000) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan pada hakekatnya mempelajari konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik. Menurut Aderson (1979) berpendapat evaluasi kebijakan publik memusatkan perhatiannya pada estimasi, penilaian, dan taksiran terhadap implementasi (proses) dan akibat-akibat (dampak) kebijakan (dalam Solahuddin, 2010:121).

Makna dan fungsi dari evaluasi kebijakan (dalam Deddy, 2016:99) bermuara pada tujuan sebagai berikut :

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat suatu tujuan dan sasaran.
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui beberapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
- c. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur seberapa besar kualitas pengeluaran atau output dari kebijakan.
- d. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
- e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan.
- f. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah memberikan masukan bagi proses kebijakan kedepan agar lebih baik.

Secara spesifik Dunn (dalam Nugroho, 2003:196) mengembangkan tiga pendekatan dalam evaluasi implementasi kebijakan, yaitu evaluasi semua, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis.

- a. Evaluasi semua merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi valid tentang hasil kebijakan tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil kebijakan terhadap individu, kelompok, ataupun masyarakat.
- b. Evaluasi formal merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program kebijakan.
- c. Evaluasi keputusan teoritis merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan.

Menurut Dunn (dalam Nugroho, 2003:185) evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai dan manfaat hasil kebijakan. Untuk melakukan evaluasi penggunaan maka digunakan pendekatan evaluasi formal dengan menggunakan tipe evaluasi formatif. Oleh karena itu kita harus membuat skema umum penilaian dan membuat seperangkat instrument menurut Akdon (dalam Badrudin, 2015:61) yang meliputi :

1. Input (masukan) adalah indikator segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan. Untuk itu dikembangkan instrument yang meliputi indikatornya :

- a. Sumber daya dukungan (SDM, uang, sasaran/prasarana)
- b. Bahan-bahan dasar pendukung (Peralatan, teknologi)

2. Proses yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat, tahapan kegiatan yang akan dilakukan. Untuk itu dikembangkan instrument yang meliputi indikatornya:

- a. Tepat guna atau tidak
- b. Efisien atau tidak

3. Output (hasil) yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan disebut dengan sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik dan non fisik. Untuk itu dikembangkan instrument dengan indikator sebagai berikut :

- a. Seberapa besar sasaran yang tercapai
- b. Seberapa banyak kelompok sasaran yang tertangani

c. Seberapa besar kelompok sasaran yang terlibat

4. Outcomes (dampak) yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan. Dengan indikatornya sebagai berikut :

- a. Ada atau tidak perubahan pada target/sasaran atau dampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan.
- b. Seberapa besar perubahan kelompok sasaran yang ingin dibangun.

Menurut Panji Santoso (2008:43) bahwa evaluasi kebijakan adalah penilaian terhadap kemampuan pemerintahan dalam proses dan programnya.

Konsep Pelaksanaan

Unsur-unsur pelaksanaan menurut Wahab (2008:45) "Pelaksanaan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya". Adapun unsur-unsur dalam pelaksanaan meliputi , Adanya program yang dilaksanakan, Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dan program tersebut, Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses pelaksanaan tersebut.

Menurut Lukman Ali (2010:104), "Pelaksanaan adalah mempraktekkan atau memasang". Pelaksanaan juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan. Sedangkan Rian Nugroho (2003:158) "Pelaksanaan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang di inginkan".

Sedangkan menurut Cahyononim dalam J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zin (2010:1487) mengatakan Pelaksanaan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Menurut Wahab dan Van Meter dan Van Horn (2012:135) "Pelaksanaan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang di arahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan". Dalam hal ini, pelaksanaan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat di praktekkan ke dalam masyarakat.

Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Menurut Bahagijo (2016) SDGs merupakan rencana pembangunan untuk semua Negara sekaligus rencana perubahan sosial berskala besar, yang bukan hanya soal pergeseran konsumsi dan produksi, namun juga perombakan kelembagaan atau pemerintah dalam menyelesaikan masalah.

Menurut Sach (2015) dalam Djonet Santoso konsep dasar pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang menyelaraskan antara tujuan-tujuan ekonomi, sosial, lingkungan dan pemerintahan atau institusi yang baik.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berbentuk analisis deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk melakukan pengukuran secara cermat dan menyeluruh terhadap suatu konsep atau fenomena-fenomena sosial tertentu kemudian penelitian ini mengembangkan konsep dan penghimpunan fakta. Menurut Arikunto (2006:12) "penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya.

Tipe kualitatif digunakan karena dapat menghasilkan data dengan akurat dan terperinci. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara tersusun, fakta dan akurat sehingga mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan

antar fenomena yang diteliti. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama (Sugiyono, 2014:7).

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama : Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru.

Input

Input yaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan, meliputi sumber daya manusia, sarana atau prasarana, sosialisasi kebijakan.

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya alam merupakan suatu rancangan dari berbagai sistem formal pada sebuah organisasi dengan tujuan memastikan penggunaan keahlian manusia secara efektif serta efisien untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan sesuai keinginan. Pada sub indikator ini peneliti melakukan wawancara mengenai sumber daya manusia adalah sebagai berikut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan key informan oleh Ibu Tuti Fatmawati, SP,M.KM,M.Med.Sc (Sekretariat SDGs Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan) terkait dengan sumber daya manusia yaitu sebagai berikut :

“Sumber Daya Manusia dalam sekretariat goals pertama tanpa kemiskinan cukup atau tidaknya tergantung dengan kebutuhan, dilihat dari SK yang sudah diberikan kepada kepala badan perencanaan pembangunan daerah penelitian dan pengembangan Provinsi Riau.”(Wawancara Kamis 29 Februari 2024, Pukul 12.05WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai sumber daya manusia menunjukkan bahwa sumber daya manusia dinilai cukup apabila sesuai dengan SK dan kebutuhan yang diperlukan didalam sekretariat goals pertama pada pilar sosial yaitu tanpa kemiskinan. Menurut CIPD (The Chartered Institute of Personnel and Development) dalam Mullins (2005) yaitu suatu strategi perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan yang bertujuan dalam mengelola manusia (karyawan) agar memiliki kinerja usaha yang maksimal termasuk pada kebijakan pengembangan serta proses untuk mendukung strategi. Dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan ini diperlukan sumber daya manusia yang cukup dalam instansi yang terkait demi terwujudnya tujuan SDGs ini, terkhusus pada pilar sosial tujuan pertama tanpa kemiskinan.

b. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan kita. Sistem ini berisi urutan proses melakukan proses pekerjaan dari awal sampai akhir. Berikut ini adalah hasil wawancara mengenai SOP kepada key informan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan key informan oleh Ibu Tuti Fatmawati, SP,M.KM,M.Med.Sc (Sekretariat SDGs Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan) terkait dengan SOP yaitu sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan pada Bappedalitbang sudah memiliki SOP dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan hal yang ditetapkan. Standar Operasional Prosedur terus dimaksimalkan dengan diadakannya pembaruan sesuai dengan hal yang dibutuhkan untuk meningkatkan pelaksanaan evaluasi.”(Wawancara Kamis 29 Februari 2024, Pukul 12.10 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai SOP dengan Sekretariat SDGs Bappedalitbang Daerah Provinsi Riau terkait Standar Operasional Prosedur menunjukkan bahwa Bappedalitbang sudah menjalankan SOP mengenai evaluasi SDGs sebagai landasan dalam melaksanakan evaluasi tersebut. Namun, Bappedalitbang harus bekerjasama dengan baik antar dinas sebagai pemangku kepentingan demi terwujudnya evaluasi tujuan pembangunan berkelanjutan yang berkualitas sehingga meningkatkan kualitas data dalam proses pengumpulan, analisis dan pelaporan hasil evaluasi. Sehingga Bappedalitbang dapat memastikan bahwa evaluasi digunakan untuk kemajuan pencapaian SDGs secara efektif. Sesuai dengan Teori Menurut Sailendra (2015:11) Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman yang dipakai untuk membenarkan bahwa aktivitas operasional organisasi maupun perusahaan dapat berjalan secara baik dan lancar

Proses

Proses adalah bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat, meliputi kejelasan mekanisme, kepastian, penertiban, dan keefektifan dalam pelaksanaan kebijakan.

a. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan atau tugas yang diemban dan kesanggupan untuk memikul resiko dari suatu perbuatan yang dilakukan. Berikut ini adalah wawancara dan hasil wawancara dengan key informan mengenai tanggung jawab pelaksana evaluasi SDGs.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan key informan oleh Ibu Tuti Fatmawati, SP,M.KM,M.Med.Sc (Sekretariat SDGs Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan terkait dengan tanggung jawab pelaksana terhadap evaluasi yaitu sebagai berikut :

“Dalam hal tanggung jawab yang dijalankan oleh Bappedalitbang Provinsi Riau sudah di atur dalam SK, dan tanggung jawab tersebut cukup dilaksanakan dengan baik oleh Bappedalitbang provinsi riau, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pembenahan setiap waktu perlu dilakukan demi tercapainya evaluasi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan tanpa kemiskinan di Kota Pekanbaru.”(Wawancara 29 Februari 2024, Pukul 12.15 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas mengenai tanggung jawab dapat di ketahui bahwa Bappedalitbang Provinsi Riau mengenai tanggung jawab sudah di atur di dalam SK setiap pegawai. SK yang diberikan menjadikan tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. SK yang diberikan menjadi acuan kerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Daryanto (2013:142) menyatakan bahwa tanggung jawab adalah sikap dan perilaku untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam,sosial, dan budaya), Negara dan Tuhan yang Mahan Esa.

b. Transparansi Kerja

Transparansi adalah sesuatu hal yang nyata, jelas dan terbuka serta dapat dipertanggung jawabkan keberadaannya. Berikut ini adalah hasil wawancara terhadap key informan mengenai transparansi terhadap evaluasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan key informan oleh Ibu Tuti Fatmawati, SP,M.KM,M.Med.Sc (Sekretariat SDGs Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan) terkait dengan transparansi kerja terhadap hasil evaluasi yaitu sebagai berikut :

“Untuk transparansi dalam hal evaluasi sudah berjalan dengan baik contohnya apabila si A atau si B ditunjuk melakukan evaluasi ke kabupaten yang ditetapkan akan ada transparansi kerja antara satu sama lain.” (Wawancara Kamis 29 Februari 2023 Pukul 12.20 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas mengenai transparansi kerja di ketahui bahwa transparansi kerja pada Bappedalitbang sudah cukup baik dalam dilaksanakan. Hal itu dapat dilihat adanya keterbukaan pekerjaan apabila salah satunya ditunjuk untuk melaksanakan evaluasi SDGs. Menurut Mahmudi (2016:17) transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Hubungan kerja yang baik akan menciptakan keterbukaan antar organisasi sehingga dapat memberikan informasi satu sama lain sebagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan evaluasi pelaksanaan SDGs yang baik.

Output (Hasil)

Output adalah hasil dari pelaksanaan kebijakan. apakah suatu pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Output meliputi tepat tidaknya sasaran yang dituju, sasaran yang tertangani, dan kelompok yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

a. Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga Negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. (Sunarti:2012)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan key informan oleh Ibu Tuti Fatmawati, SP,M.KM,M.Med.Sc (Sekretariat SDGs Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan) terkait dengan kesejahteraan terhadap hasil evaluasi yaitu sebagai berikut :

“Sekretariat SDGs Bappedalitbang mengatakan bahwa apabila data kemiskinan pada Badan Pusat Statistik menurun, berjuan pertama tanpa kemiskinan sudah berhasil. Jika kemiskinan pada masyarakat sudah berkurang tentu kesejahteraan pada masyarakat sudah mulai terwujud”. (Wawancara 29 Februari 2024, Pukul 12. 25 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas mengenai kesejahteraan dapat diketahui bahwa tingkat keberhasilan SDGs pada tujuan pertama tanpa kemiskinan dapat dinilai dari berkurang atau tidaknya angka kemiskinan yang ada pada Badan Pusat Statistik. Hal itu dikarenakan apabila angka kemiskinan menurun tentu angka kesejahteraan sudah mulai terwujud bagi masyarakat. Menurut Sunarti (2012) Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga Negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya sebagai diri, rumah tangga serta masyarakat.

Tabel V.3 Persentase Penduduk Miskin Di Kota Pekanbaru

No	Tahun	Persentase
1	2014	3.20%
2	2015	3.25%
3	2016	3.10%
4	2017	3.5%
5	2018	2.80%
6	2019	2.60%
7	2020	2.65%
8	2021	2.80%
9	2022	3.5%
10	2023	3.20%

Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan. Persentase penduduk miskin memiliki kesamaan pada tahun 2014 dengan tahun 2023, hal ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan belum terlaksana dengan baik. Dibuktikan dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru di atas.

b. Kemakmuran

Kemakmuran adalah kondisi dimana manusia bisa memenuhi kebutuhannya, baik berupa barang atau jasa. (M.Manullang)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan key informan oleh Ibu Tuti Fatmawati, SP,M.KM,M.Med.Sc (Sekretariat SDGs Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan) terkait dengan kemakmuran terhadap hasil evaluasi yaitu sebagai berikut :

“Kemakmuran akan berdampak secara signifikan pada masyarakat contohnya dalam hal pendapatan, bahwa semakin tinggi pendapatan maka kebutuhan dasarnya akan terpenuhi

jadi apabila dapat dipenuhi maka akan berujung pada kemakmuran, itu cita-cita yang tercantum pada UU.” (Wawancara Kamis 29 Februari 2024 Pukul 12.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas mengenai kemakmuran di ketahui bahwa kemakmuran menjadi cita-cita yang tercantum di dalam UU, semakin tinggi pendapatan maka kebutuhan dasarnya akan terpenuhi. Apabila kebutuhan dasar terpenuhi tentu sudah dapat menciptakan kemakmuran bagi dirinya sendiri. Kemakmuran adalah keadaan kehidupan Negara yang rakyatnya mendapat kebahagiaan jasmani dan rohani akibat terpenuhi kebutuhannya (KBBI, 2020). Jika pendapatan masyarakat dapat mencukupi kebutuhan dasarnya setiap hari, maka akan tercipta kemakmuran bagi masyarakat tersebut.

Outcome (Dampak)

Outcome yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan, meliputi perubahan atau perbaikan, peningkatan dan dampak positif terhadap implemantor yang terlibat didalamnya.

a. Berkurangnya Angka Kejahatan

Kejahatan adalah perilaku penyimpangan social masyarakat yang keluar dari norma dan nilai sosial, perilaku ini menjadi penentu dalam pelanggaran ketentuan hokum pidana, sehingga seseorang yang melakukan kejahatan harus dihukum sesuai dengan keteraturan sosial yang berlaku di masyarakat. (Sutherland).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan key informan oleh Ibu Tuti Fatmawati, SP,M.KM,M.Med.Sc (Sekretariat SDGs Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan) terkait dengan berkurangnya angka kejahatan terhadap hasil evaluasi yaitu sebagai berikut :

“Untuk kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat memang kebanyakan dikarenakan sulitnya untuk seseorang memenuhi kebutuhan dasar, namun fenomena sosial kita sekarang banyak juga yang mencuri dengan cara yang lain contohnya penipuan. Dan terkadang bukan untuk memenuhi kebutuhan dasar melainkan seseorang tersebut ingin mendapat hal yang lebih.”(Wawancara Kamis 29 Februari 2024 Pukul 12.35 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas mengenai berkurangnya angka kejahatan diketahui bahwa masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehingga munculnya kejahatan demi memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Namun, sering juga terjadi fenomena sosial yang terjadi di masyarakat tentang penipuan dan sebagainya, bukan karena ingin memenuhi kebutuhan dasar melainkan menginginkan sesuatu hal yang lebih.

b. Berkurangnya Angka Pengangguran

Pengangguran adalah keadaan dimana angkatan kerja yang ingin memperoleh pekerjaan tapi belum mendapatkannya. (Yanuar:2009)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan key informan oleh Ibu Tuti Fatmawati, SP,M.KM,M.Med.Sc (Sekretariat SDGs Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan) terkait dengan berkurangnya angka pengangguran terhadap hasil evaluasi yaitu sebagai berikut :

“Apabila SDGs Goals Pertama Tanpa Kemiskinan Di Kota Pekanbaru dapat terwujud maka seharusnya dapat mengurangi angka pengangguran, karena terkait dengan strategi

pengurangan kemiskinan terdapat beberapa langkah untuk mengurangi kemiskinan yaitu dengan cara pengurangan beban (bantuan sosial), pemberdayaan (pemberian pekerjaan/keterampilan).” (Wawancara Kamis 29 Februari 2024 Pukul 12.40 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas mengenai berkurangnya angka pengangguran dapat di ketahui sudah banyak hal yang dilaksanakan untuk mengentas kemiskinan yang ada di Kota Pekanbaru. Hal tersebut dengan bantuan sosial dan pemberdayaan sosial. Dengan adanya beberapa langkah ini tentu akan membantu terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya pada tujuan pertama yaitu tanpa kemiskinan. Menurut Sukirno (1994) Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya.

Kesimpulan

Dari pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama : Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru”, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama Tanpa Kemiskinan Di Kota Pekanbaru) belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan sumber daya masih terbatas dalam pelaksanaan evaluasi pelaksanaan SDGs pada tujuan pertama tanpa kemiskinan di Kota Pekanbaru, masih adanya keterlambatan waktu dalam pelaksanaan evaluasi SDGs ini yang berarti belum mengemban tanggung jawab dengan baik, masih kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam evaluasi pelaksanaan SDGs di Kota Pekanbaru yang mencerminkan bahwa transparansi yang belum terlaksana dengan maksimal, serta masih terjadi keterlambatan dalam pelaporan data serta informasi yang belum maksimal mengenai masyarakat miskin oleh OPD yang dipercaya di Kota Pekanbaru.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

- Agustino, Leo. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Cv. Alfabeta.
- Brodjonegoro, B. S. (2017). 17 Arah Pembangunan Berkelanjutan ditetapkan. Retrieved from [www.kontan.com:http://nasional.kontan.co.id/news/17-arah-pembangunan-berkelanjutan-ditetapkan](http://nasional.kontan.co.id/news/17-arah-pembangunan-berkelanjutan-ditetapkan).
- Budi, Winarno. 2002. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta : Media Presindo.
- Dunn, William N. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta Gadjah Mada University Press.
- Hasibuan, M. S. (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara.
- Islamy, Muh. Irfan. 2017. Kebijakan Publik. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Manullang, M. 2012. Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Maksudi, Beddy Iriawan. 2018. Dasar-Dasar Administrasi Publik. Malang : CV. SOFA Mandiri Dan Indonesia Print.

- Nurcholis, Hanif. 2007. Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta : PT. Grasindo.
- Nurmansyah. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Pekanbaru : UNILAK Press.
- Nurman. 2015. Strategi Pembangunan Daerah. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Pasolong, Harbani. (2011). Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta : Balairung.
- Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta :UNY Press.
- Syafiie, Inu Kencana. 2015. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI). Jakarta : Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P. 2016. Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, Dan Strateginya. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Terry, George R. (2014). Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Wirawan. (2011). Evaluasi (Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi). Jakarta : PT Raja Grafindo Perseda.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAIP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of

collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.

- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).

- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.

- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163-175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.

- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogia, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in

Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).

- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.

- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.
- Zulkifli. 2005. Pengantar Studi Ilmu Administrasi & Manajemen. Pekanbaru. UIR Press.
- Zulkifli. et. al. 2013. Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, Kertas Kerja Mahasiswa. Pekanbaru: Fisipol UIR.
- Zulkifli Dan Yogia, Moris Adidi. 2014. Fungsi-Fungsi Manajemen. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh Publishing.
- Yenchilia Tresna Damanik, Aufarul Marom, (2016). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan

Kemiskinan Melalui Program Pelatihan Keterampilan Di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembang Kota Semarang.

Sustainable Development Goals : Tinjauan Percepatan Pencapaian Di Provinsi Riau Oleh Eko Handrian dan Hendry Andry

Regulasi:

Peraturan Gubernur Riau Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Riau Tahun 2017-2019

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 19 Ayat 4 Tentang Evaluasi Dilaksanakan Satu Tahun Sekali atau Sewaktu-waktu Apabila Diperlukan